

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

**a. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2019 dan 2018 dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja. Realisasi belanja pada tahun anggaran 2019 adalah sebesar **Rp. 138.485.650.066,00** atau mencapai **93,41%** dari pagu anggaran **Rp.148.713.891.399,09**.

**b. Laporan Neraca**

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2019 mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal pelaporan. Jumlah aset per 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp. 1.473.065.602.078,33** yang terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp.1.570.124.896,00** Aset Tetap sebesar **Rp.1.471.358.477.182,33** Aset Tetap Lainnya sebesar **Rp.137.000.000,00**. Ekuitas per 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp. 1.335.088.452.012,33**.

**c. Laporan Operasional**

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menggambarkan seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Jumlah Pendapatan LO per 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp.354.000.000,00** dan Beban Operasi sebesar **Rp.21.325.214.179,90**.

**d. Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menggambarkan perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi ekuitas dan ekuitas akhir. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp.1.473.065.602.078,33**.

**e. Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK menyajikan informasi penjelasan tentang pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari kas daerah.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, ekuitas dana diakui aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari kas daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

**Catatan Atas Laporan Keuangan****Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya**

*Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018*

---

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 15 Agustus 2014 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Murung Raya;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016);
23. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 172, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 42);
25. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 23).

**1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain :

- a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
- c. Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya
- d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual, dan pos-pos pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas
- e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembaran muka laporan keuangan

**BAB II**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN**

**2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya pada Tahun Anggaran 2019 mendapat Anggaran Pendapatan dan Belanja sebesar **Rp. 148.713.891.399,09** yang terdiri dari :

No.	Uraian	Anggaran
1	Pendapatan Asli Daerah	
	- Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	1.190.000.000,00
	- Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	-
2	Belanja Operasi	21.349.340.975,00
	- Belanja Pegawai	11.480.246.875,00
	- Belanja Barang dan Jasa	7.017.764.100,00
	- Belanja Hibah	2.851.330.000,00
3	Belanja Modal	63.086.666.100,00
	- Belanja Modal Tanah	2.902.518.000,00
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.200.000,00
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.628.939.650,00
	- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	56.460.008.450,00
	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-
	- Belanja Modal Aset Lainnya	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>84.436.007.075,00</b>

**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya**  
*Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018*

Realisasi pencapaian target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya selama Tahun 2019 dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Rasio
1	Pendapatan Asli Daerah			
-	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	1.190.000.000,00	272.100.000,00	-
-	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	-	-	-
2	Belanja Operasi	21.349.340.975,00	20.155.381.986,00	94,41
-	Belanja Pegawai	11.480.246.875,00	11.037.711.894,00	96,15
-	Belanja Barang dan Jasa	7.017.764.100,00	6.283.896.489,00	89,54
-	Belanja Hibah	2.851.330.000,00	2.833.773.603,00	99,38
3	Belanja Modal	63.086.666.100,00	51.734.567.740,00	
-	Belanja Tanah	2.902.518.000,00	2.775.857.750,00	95,64
-	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.200.000,00	92.113.900,00	96,76
-	Belanja Gedung dan Bangunan	3.628.939.650,00	2.817.414.895,00	77,64
-	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	56.460.008.450,00	46.049.181.195,00	81,56
-	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-
-	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>84.436.007.075,00</b>	<b>71.889.949.726,00</b>	<b>85,14</b>

**2.2 Hambatan dan Kendala**

Secara umum dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal pada setiap program kegiatan, tidak terlepas dari hambatan atau pun kendala. Namun secara keseluruhan hambatan ataupun kendala tersebut dapat diatasi berkat kerjasama dan koordinasi yang baik antar berbagai pihak.

**BAB III**  
**KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**3.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan, Entitas Pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya. Entitas Akuntansi adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) sebagai pengguna anggaran/pengguna barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditunjukkan kepada Entitas Pelaporan dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya.

**3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah **basis akrual**, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas yang artinya pengakuan dan pencatatan dilakukan pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sedangkan untuk pendapatan dan belanja basis akuntansi yang digunakan adalah **basiskas** yang artinya pengakuan dan pencatatan dilakukan pada saat kas diterima atau dibayar.

**3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikan laporan keuangan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan didasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, dan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

**3.3.1 Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah

**3.3.2 Beban**

Beban adalah penurunan masa manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban

**3.3.3 Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya. Pengukuran dan penilaian adalah sebagai berikut :

1. Aset Lancar

Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diukur dengan biaya perolehan.

Aset Tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan dan Akumulasi Penyusutan.

3. Aset Tetap Lainnya

Mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/budayaan, hewan, ikan dan tanaman.

### **3.3.4 Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahan daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaian yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP berbasis akrual nomor 09 tentang Kewajiban antara lain :

#### 1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

#### 2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayarkan dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

### **3.3.5 Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah

## **3.4 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dan selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya juga telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Murung Raya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.

Terkait dengan Peraturan tersebut maka dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Murung Raya tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Murung Raya, namun ada beberapa hal yang perlu dijelaskan antara lain :

## **Catatan Atas Laporan Keuangan**

### **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya**

*Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018*

---

1. Pengakuan

Pengakuan Aset diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Persediaan dicatat dengan menggunakan pendekatan aset. Artinya adalah pada waktu persediaan diterima, maka pada saat itu dilakukan pencatatan awal persediaan sebagai akun neraca.

Beban persediaan diakui sejumlah pemakaian persediaan yang dilakukan. Jumlah Persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (Stock Opname) pada akhir periode dan dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi dimasa depan timbul.

2. Kapitalisasi

Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya telah menetapkan batasan kapitalisasi aset dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2017, yang tertuang dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.

3. Penyusutan

Untuk penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2017 Pemerintah Daerah telah menerapkan penyusutan aset dimana metode yang digunakan adalah metode garis lurus dan telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Daerah.

## **BAB V**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **5.1 Gambaran Umum**

##### **5.1.1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya menyelenggarakan fungsi :

1. Pengendalian kegiatan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Perumusan Kebijakan teknis Cipta Karya, Bina Marga, Pengairan dan Penataan Ruang;
3. Penyusunan rencana kegiatan di bidang Cipta Karya, Bina Marga, Pengairan dan Penataan Ruang;
4. Pengelolaan, pemeliharaan barang inventaris dan aset daerah;
5. Monitoring dan pengawasan pelaksanaan kegiatan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
6. Pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
7. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas dan Fungsi; dan
8. Pelaksanaan Tugas Lainnya Berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan Oleh Bupati.

##### **5.1.2 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya**

###### **Visi :**

Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang menjadi kewenangan daerah, maka cara pandang ke depan organisasi ini harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif maka gambaran kedepan yang diinginkan, adalah sebagaimana dalam pernyataan visi sebagai berikut ini :

***“ Terwujudnya Masyarakat Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pembangunan Perdesaan Menuju Murung Raya Emas Tahun 2030.”***

**Dengan indikator :**

- 1. Masyarakat Kabupaten Murung Raya yang sejahtera dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang kondisi masyarakat Kabupaten Murung Raya yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan .*
- 2. Masyarakat Kabupaten Murung Raya yang bermartabat dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang mempunyai harkat yang baik dan berbudi pekerti yang luhur.*
- 3. Pembangunan Perdesaan dimaknai sebagai proses dimana masyarakat perdesaan memanfaatkan potensi perdesaan untuk meningkatkan taraf hidup.*

Didalam visi tersebut terkandung keinginan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya untuk memosisikan diri sebagai unit organisasi pemerintah daerah yang melayani kepentingan masyarakat melalui Pembangunan Infrastruktur.

**Misi :**

Agar visi yang ditetapkan dapat secara bertahap diterapkan, maka perumusan pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting bagi operasionalisasi atau harus dilaksanakan.

Adapun Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya yang harus dilaksanakan dan harus diketahui semua pihak akan keberadaan dari unit organisasi ini, adalah sebagai berikut ini :

- 1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan mantra spasial dari pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan pemukiman yang berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan.*
- 2. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air.*
- 3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan.*
- 4. Meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur pemukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan.*

5. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang.
6. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta penerapan IPTEK, norma, standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung Infrastruktur PU dan Pemukiman.
7. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.
8. Meminimalkan penyimpangan dan praktek-praktek KKN dilingkungan Kementerian PU dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengawasan profesional.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Murung Raya untuk Tahun Anggaran 2019. Catatan atas laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Puruk Cahu, ..... Maret 2019

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN MURUNG RAYA**

**RICHARD.F.L, ST**  
NIP.19690930 199503 1 003



**BAB IV**  
**PENJELASAN POS -POS LAPORAN KEUANGAN**

**1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN ( LRA )**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyediakan informasi mengenai realisasidan Belanja pada Tahun Anggaran 2019 yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya :

**1. 1. BELANJA OPERASI**

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Operasi untuk Tahun Anggaran 2018 dan 2019 terinci sebagai berikut :

No	Belanja Operasi	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
1	Belanja Pegawai	11.480.246.875,00	11.037.711.894,00	96,15	11.722.764.319,00
2	Belanja Barang	7.017.764.100,00	6.283.896.489,00	89,54	9.190.890.382,00
3	Belanja Hibah	2.851.330.000,00	2.833.773.603,00	99,38	404.420.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>21.349.340.975,00</b>	<b>20.155.381.986,00</b>	<b>94,41</b>	<b>21.318.074.701,00</b>

**1. 1. 1. Belanja Pegawai**

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Pegawai untuk Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

No	Belanja Pegawai	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
<b>1</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan</b>				
	Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.400.000.000,00	2.320.477.200,00	95,83	2.299.802.000,00
	Belanja Tunjangan Keluarga	240.000.000,00	225.591.414,00	94,34	226.421.536,00
	Belanja Tunjangan Jabatan	265.000.000,00	233.990.000,00	91,33	242.030.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Tunjangan Beras	190.000.000,00	137.525.580,00	77,76	147.736.800,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	20.000.000,00	2.087.524,00	9,49	1.898.478,00
	Belanja Pembulatan Gaji	65.000,00	36.458,00	61,55	40.006,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	-
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	7.000.000,00	4.783.446,00	68,33	4.718.843,00
	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	18.000.000,00	14.350.272,00	79,72	5.930.656,00
	Tunjangan Umum	100.000.000,00	79.715.000,00	79,72	86.235.000,00
	<b>SUB JUMLAH</b>	<b>3.240.065.000,00</b>	<b>3.018.556.894,00</b>	<b>93,16</b>	<b>3.014.813.319,00</b>
<b>2</b>	<b>Belanja Tambahan Penghasilan PNS</b>				
	Tunjangan Lauk Pauk	368.571.875,00	367.722.000,00	99,77	398.527.000,00
	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah	1.868.200.000,00	1.832.340.000,00	98,08	1.526.440.000,00
	<b>SUB JUMLAH</b>	<b>2.236.771.875,00</b>	<b>2.200.062.000,00</b>	<b>98,36</b>	<b>1.924.967.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Belanja Uang Lembur</b>				
	Belanja Uang Lembur PNS	25.000.000,00	22.484.000,00	89,94	73.228.000,00
	<b>SUB JUMLAH</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>74.970.000,00</b>	<b>89,94</b>	<b>73.228.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Honorarium PNS</b>				
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	582.700.000,00	503.750.000,00	86,45	421.920.000,00
	Honorarium PNS Lainnya	740.800.000,00	708.100.000,00	95,59	790.180.000,00
	<b>SUB JUMLAH</b>	<b>1.323.500.000,00</b>	<b>1.211.850.000,00</b>	<b>91,56</b>	<b>1.212.100.000,00</b>
<b>5</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>				
	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	4.654.910.000,00	4.584.759.000,00	98,49	4.630.814.000,00
	Honorarium Pegawai Panitia/Tim Teknis Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUB JUMLAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.630.814.000,00</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.825.336.875,00</b>	<b>6.505.438.894,00</b>	<b>95,31</b>	<b>10.855.922.319,00</b>

**1. 1. 2 Belanja Barang Dan Jasa**

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2018 terinci sebagai berikut :

No	Belanja Barang dan Jasa	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	%	REALISASI 2017
	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				
	Belanja Alat Tulis Kantor	122.730.000,00	132.953.600,00	108,33	132.953.600,00
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	29.950.000,00	599,00	29.950.000,00
	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	10.000.000,00	19.800.000,00	198,00	19.800.000,00
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	72.500.000,00	152.493.575,00	210,34	152.493.575,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	555.000.000,00	561.300.000,00	101,14	561.300.000,00
	<b>SUB JUMLAH</b>	<b>765.230.000,00</b>	<b>896.497.175,00</b>	<b>117,15</b>	<b>896.497.175,00</b>
	<b>Belanja Bahan/Material</b>				
	Belanja Bahan Baku Bangunan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	153.754.600,00
	Belanja Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00	14.350.000,00
	<b>SUB JUMLAH</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>168.104.600,00</b>
	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				
	Belanja Telepon	5.910.000,00	0,00	0,00	144.946.857,00
	Belanja Air	5.000.000,00	4.600.000,00	92,00	0,00
	Belanja Listrik	160.000.000,00	125.230.850,00	78,27	155.582.134,00
	Belanja Surat Kabar/Majalah	0,00	0,00	#DIV/0!	68.780.000,00
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	195.400.000,00	194.564.223,00	99,57	16.490.480,00
	Belanja Publikasi	0,00	0,00	#DIV/0!	2.900.000,00
	Belanja Dekorasi	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	0,00	0,00	#DIV/0!	104.500.000,00
	<b>SUB JUMLAH</b>	<b>366.310.000,00</b>	<b>324.395.073,00</b>	<b>88,56</b>	<b>493.199.471,00</b>
	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>				
	Belanja Jasa Service	84.500.000,00	79.794.000,00	94,43	116.010.000,00
	Belanja Penggantian Suku Cadang	300.000.000,00	298.640.200,00	99,55	616.542.986,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	140.379.000,00	140.370.000,00	99,99	200.000.000,00
	Belanja Jasa KIR	5.000.000,00	1.010.000,00	20,20	955.000,00
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	12.500.000,00	11.779.800,00	94,24	11.864.600,00
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.500.000,00	6.652.700,00	88,70	0,00
	<b>SUB JUMLAH</b>	<b>549.879.000,00</b>	<b>538.246.700,00</b>	<b>97,88</b>	<b>945.372.586,00</b>
	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				
	Belanja Cetak	15.000.000,00	14.922.500,00	99,48	23.748.000,00
	Belanja Penggandaan	51.500.000,00	42.333.750,00	82,20	53.649.900,00
	<b>SUB JUMLAH</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>57.256.250,00</b>	<b>86,10</b>	<b>77.397.900,00</b>
	<b>Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat</b>				
	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	0,00	#DIV/0!	7.500.000,00
	<b>SUB JUMLAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>7.500.000,00</b>
	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>				
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	#DIV/0!	16.500.000,00
	<b>SUB JUMLAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>16.500.000,00</b>
	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	64.288.000,00	0,00	0,00	17.655.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	19.500.000,00	0,00	0,00	27.948.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	14.920.000,00	99,47	14.460.000,00
	<b>SUB JUMLAH</b>	<b>98.788.000,00</b>	<b>14.920.000,00</b>	<b>15,10</b>	<b>60.063.000,00</b>

<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>				
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	48.735.000,00	4.735.000,00	9,72	-
<b>SUB JUMLAH</b>	<b>48.735.000,00</b>	<b>4.735.000,00</b>	<b>9,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu</b>				
Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	#DIV/0!	49.900.000,00
Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	#DIV/0!	49.200.000,00
Belanja Kemeja Putih Celana/Rok Hitam	42.250.000,00	42.250.000,00	100,00	74.800.000,00
<b>SUB JUMLAH</b>	<b>42.250.000,00</b>	<b>42.250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>173.900.000,00</b>
<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	909.629.000,00	895.832.000,00	98,48	629.478.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.076.539.100,00	2.049.862.327,00	98,72	1.625.090.650,00
<b>SUB JUMLAH</b>	<b>2.986.168.100,00</b>	<b>2.945.694.327,00</b>	<b>98,64</b>	<b>2.254.568.650,00</b>
<b>Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS/Non PNS</b>				
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	38.274.000,00	0,00	0,00	895.832.000,00
Belanja Bimbingan Teknis	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	2.049.862.327,00
<b>SUB JUMLAH</b>	<b>56.274.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>31,99</b>	<b>2.945.694.327,00</b>
<b>Belanja Pemeliharaan</b>				
Belanja Pemeliharaan Jalan	1.201.688.000,00	1.195.967.629,00	99,52	123.205.000,00
Belanja Pemeliharaan Jembatan	230.230.000,00	175.940.000,00	76,42	0,00
Belanja Pemeliharaan Tanah	50.000.000,00	49.320.000,00	98,64	3.345.380.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	95.000.000,00	89.384.000,00	94,09	3.345.380.000,00
<b>SUB JUMLAH</b>	<b>1.576.918.000,00</b>	<b>1.510.611.629,00</b>	<b>95,80</b>	<b>3.468.585.000,00</b>
<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>				
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	500.000.000,00	30.000.000,00	6,00	494.029.000,00
Belanja Jasa Keahlian Profesi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB JUMLAH</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>6,00</b>	<b>494.029.000,00</b>
<b>Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS</b>				
Belanja Sosialisasi	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	#DIV/0!	36.500.000,00
<b>SUB JUMLAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>36.500.000,00</b>
<b>Belanja Honorarium PNS</b>				
Belanja Honorarium PNS Lainnya	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
<b>SUB JUMLAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000.000,00</b>
<b>Belanja Honorarium Non PNS</b>				
Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB JUMLAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah</b>	<b>6.983.528.100,00</b>	<b>6.347.356.154,00</b>	<b>90,89</b>	<b>19.798.035.101,00</b>

**1. 1. 3. Belanja Hibah**

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2018 terinci sebagai berikut :

No	Belanja Hibah	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
1	Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	1.021.170.000,00	1.021.170.000,00	100,00	406.420.000,00
2	Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	1.830.160.000,00	1.812.603.603,00	99,04	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.851.330.000,00</b>	<b>2.833.773.603,00</b>	<b>99,38</b>	<b>406.420.000,00</b>

**1. 1. 4. Belanja Modal**

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2017 terinci sebagai berikut :

No	Belanja Modal	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
1	Belanja Modal Tanah	2.902.518.000,00	2.775.857.750,00	95,64	2.629.325.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.200.000,00	92.113.900,00	96,76	1.018.980.155,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.628.939.650,00	2.817.414.895,00	77,64	3.307.012.400,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan	56.460.008.450,00	46.049.181.195,00	81,56	110.212.257.810,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	-	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>63.086.666.100,00</b>	<b>51.734.567.740,00</b>	<b>82,01</b>	<b>117.167.575.365,00</b>

No	Belanja Modal	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
<b>1</b>	<b>Belanja Modal Tanah</b>				
	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung	<b>882.500.000,00</b>	<b>763.751.750,00</b>	<b>86,5</b>	<b>1.658.850.000,00</b>
	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal	300.000.000,00	190.793.750,00	63,6	1.658.850.000,00
	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong	582.500.000,00	572.958.000,00	-	-
	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah untuk Bangunan Bukan Gedung	<b>1.430.018.000,00</b>	<b>970.475.000,00</b>	<b>67,9</b>	<b>970.475.000,00</b>
	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah untuk Bangunan Jalan	1.430.018.000,00	970.475.000,00	67,9	970.475.000,00
	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	-	-	-	-
	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	-	-	-	-
	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah untuk Bangunan Air	<b>590.000.000,00</b>	<b>582.088.000,00</b>	<b>98,7</b>	-
	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah untuk Bangunan Air	590.000.000,00	582.088.000,00	98,7	-
	<b>SUB JUMLAH</b>	<b>2.902.518.000,0</b>	<b>2.316.314.750,0</b>	<b>79,8</b>	<b>2.629.325.000,0</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>2.902.518.000,00</b>	<b>2.316.314.750,00</b>	<b>79,80</b>	<b>2.629.325.000,00</b>

No	Belanja Modal	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
<b>1</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>				
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor				
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	#DIV/0!	625.487.087,00
	Pengadaan Perkakas Bengkel Service	0,00	0,00	-	0,00
	<b>SUB JUMLAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>625.487.087,00</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kapal Terbang				
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	0,00	0,00	#DIV/0!	49.500.000,00
	<b>SUB JUMLAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>49.500.000,00</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur				
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur lainnya	0,00	0,00	#DIV/0!	127.250.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	-	0,00
	<b>SUB JUMLAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>127.250.000,00</b>

	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer				
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	90.000.000,00	87.313.900,00	97,02	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	0,00	0,00	-	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	0,00	-	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	<b>SUB JUMLAH</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>87.313.900,00</b>	97,02	<b>0,00</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat				
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruang Pejabat	0,00	0,00	#DIV/0!	5.280.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	-	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari Arsip/Pejabat	0,00	0,00	#DIV/0!	12.800.000,00
	<b>SUB JUMLAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>18.080.000,00</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio				
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	0,00	-	0,00
	<b>SUB JUMLAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga				
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.200.000,00	4.800.000,00	92,31	0,00
	<b>SUB JUMLAH</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>92,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>95.200.000,00</b>	<b>92.113.900,00</b>	-	<b>820.317.087,00</b>

2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tempat Kerja				
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	588.100.000,00	579.710.350,00	98,57	32.572.500,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Instalasi	0,00	0,00	-	0,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	0,00	-	0,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	0,00	0,00	-	0,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	0,00	-	0,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.036.192.000,00	1.233.355.545,00	60,57	2.077.189.900,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tempat Tinggal				
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	1.004.647.650,00	1.004.349.000,00	99,97	1.197.250.000,00
	<b>SUB JUMLAH</b>	<b>3.628.939.650,00</b>	<b>2.817.414.895,00</b>	<b>77,64</b>	<b>3.307.012.400,00</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.628.939.650,00</b>	<b>2.817.414.895,00</b>	<b>77,64</b>	<b>3.307.012.400,00</b>

3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan				
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	40.783.892.000,00	37.832.702.952,00	92,76	74.817.089.806,00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	12.478.676.000,00	5.845.507.352,00	46,84	23.011.774.904,00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan				
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	#DIV/0!	616.996.800,00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	623.060.000,00	165.216.000,00	26,52	6.929.556.800,00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor				
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	0,00	0,00	#DIV/0!	471.052.000,00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih				
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Sumber/Mata Air	2.325.890.450,00	2.184.681.816,00	93,93	3.085.422.500,00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dalam	0,00	0,00	#DIV/0!	72.070.000,00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	#DIV/0!	56.900.000,00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum				
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Induk Distribusi	248.490.000,00	21.073.075,00	8,48	0,00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Induk Distribusi	1.348.740.000,00	1.151.395.000,00	85,37	1.877.030.050,00
	<b>Jumlah</b>	<b>57.808.748.450,00</b>	<b>47.200.576.195,00</b>	<b>81,65</b>	<b>110.937.892.860,00</b>

1. 2.	SURPLUS/DEFISIT LRA	2019	2018
	Surplus/Defisit LRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	<b>Pendapatan LRA</b>	<b>272.100.000,00</b>	<b>508.500.000,00</b>
	<b>Belanja LRA</b>	<b>71.889.949.726,00</b>	<b>138.485.650.066,00</b>
	<b>Surplus/Defisit LO</b>	<b>(71.617.849.726,00)</b>	<b>(137.977.150.066,00)</b>





**2. Peralatan dan Mesin**

- Saldo Awal 01 Januari 2019	36.087.750.696,00
- Penambahan	-
- Pengurangan	69.500.000,00
<b>Saldo Akhir 31 Desember 2019</b>	<b>36.018.250.696,00</b>

No	PERALATAN DAN MESIN	Saldo Awal 1 Januari 2019	MUTASI 2019		Saldo Akhir 31 Desember 2019
			Penambahan	Pengurangan	
	Alat-alat Besar	23.881.354.300,00	-	-	23.881.354.300,00
	Alat-a;lat Angkut	5.858.615.087,00	-	-	5.858.615.087,00
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.616.695.950,00	-	69.500.000,00	1.547.195.950,00
	Alat Pertanian	156.820.000,00	-	-	156.820.000,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.859.571.359,00	-	-	3.859.571.359,00
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	498.594.000,00	-	-	498.594.000,00
	Alat Laboratorium	216.100.000,00	-	-	216.100.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>36.087.750.696,00</b>	<b>-</b>	<b>69.500.000,00</b>	<b>36.018.250.696,00</b>

Keterangan		Penambahan	Pengurangan
<b>1. Alat Bengkel dan Dan Alat Ukur</b>			
Koreksi Reklasifikasi Pengadaan dan Pemasangan Aplikasi Pemetaan Original SPK 025/26.a/DPUPR/2018 dari Alat Ukur Lainnya ke Aset lainnya Perangkat Lunak		-	69.500.000,00

**3 Gedung dan Bangunan**

- Saldo Awal 01 Januari 2019	306.101.590.795,25
- Penambahan	-
- Pengurangan	32.572.500,00
<b>Saldo Akhir 31 Desember 2019</b>	<b>306.069.018.295,25</b>

No	GEDUNG DAN BANGUNAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2019	MUTASI 2019		Saldo 31/12/2019
			Penambahan	Pengurangan	
1	Bangunan Gedung	297.664.730.295,25	-	32.572.500,00	297.632.157.795,25
2	Monumen	8.436.860.500,00	-	-	8.436.860.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>306.101.590.795,25</b>	<b>-</b>	<b>32.572.500,00</b>	<b>306.069.018.295,25</b>

Keterangan	Penambahan	Pengurangan
<b>* Bangunan Gedung Kantor</b>		
Koreksi Reklasifikasi Pembuatan Jalan Wisata Alam Desa Tabulang dan Rumah Singgah SPK.602/01.2/PRCN PP1/CK PUPR/II/2018 dari Desa ke KDP jalan Desa	-	32.572.500,00
	-	

**4. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

- Saldo Awal 01 Januari 2019	1.568.487.123.105,00
- Penambahan	1.329.137.400,00
- Pengurangan	440.736.500,00
<b>Saldo Akhir 31 Desember 2019</b>	<b>1.569.375.524.005,00</b>

No	LAN, IRIGASI DAN JARING	SALDO AWAL 1 JANUARI 2019	MUTASI 2019		Saldo 31/12/2019
			Penambahan	Pengurangan	
1	Jalan dan Jembatan	1.341.588.734.039,00	1.329.137.400,00	273.996.500,00	1.342.643.874.939,00
2	Bangunan Air/Irigasi	63.579.197.397,00	-	-	63.579.197.397,00
3	Instalasi	28.177.818.510,00	-	47.030.000,00	28.130.788.510,00
4	Jaringan	135.141.373.159,00	-	119.710.000,00	135.021.663.159,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.568.487.123.105,00</b>	<b>1.329.137.400,00</b>	<b>440.736.500,00</b>	<b>1.569.375.524.005,00</b>

**Keterangan**

	Penambahan	Pengurangan
* Koreksi penambahan nilai pada jalan dan jembatan yang dikarenakan peralihan dari barang Ekstrakompatable jalan Kabupaten Lain-lain TA. 2014 dan TA. 2015 ke Aset Tetap Jalan Kabupaten Lain-lain	1.329.137.400,00	-
* Koreksi Reklasifikasi perencanaan pembangunan Sarana air bersih Desa Liang Nyaling dari Air sumber/Mata Air ke KDP Air Sumber/Mata Air (Ekstrakompatable)	-	47.030.000,00
* Koreksi Pengurangan Nilai pada jalan, Irigasi dan Jaringan yang dikarenakan masuk ke Barang Ekstrakompatable	-	119.710.000,00

**5. Aset Tetap Lainnya**

- Saldo Awal 01 Januari 2019	12.500.000,00
- Penambahan	-
- Pengurangan	-
<b>Saldo Akhir 31 Desember 2019</b>	<b>12.500.000,00</b>

No	ASET TETAP LAINNYA	SALDO AWAL 31/12/2019	MUTASI 2019		SALDO AKHIR 31/12/2019
			Penambahan	Pengurangan	
1	Buku dan Perpustakaan	12.500.000,00	-	-	12.500.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.500.000,00</b>

**6. Kontruksi Dalam Pengerjaan**

- Saldo Awal 01 Januari 2019	9.017.373.740,00
- Penambahan	344.316.500,00
- Pengurangan	124.906.500,00
<b>Saldo Akhir 31 Desember 2019</b>	<b>9.236.783.740,00</b>

No	LAN, IRIGASI DAN JARING	SALDO AWAL 1 JANUARI 2018	MUTASI 2019		Saldo 31/12/2019
			Penambahan	Pengurangan	
1	Tanah	148.600.000,00	-	-	148.600.000,00
2	Peralatan dan Mesin	0,00	-	-	0,00
3	Gedung dan Bangunan	8.868.773.740,00	-	-	8.868.773.740,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	344.316.500,00	124.906.500,00	219.410.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	-	-	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>9.017.373.740,00</b>	<b>344.316.500,00</b>	<b>124.906.500,00</b>	<b>9.236.783.740,00</b>
	<b>Jumlah</b>		<b>688.633.000,00</b>	<b>249.813.000,00</b>	

**Keterangan**

	Penambahan	Pengurangan
* Koreksi penambahan nilai pada jalan dan jembatan yang dikarenakan peralihan dari barang Ekstrakompatable jalan Kabupaten Lain-lain TA. 2014 dan TA. 2015 ke Aset Tetap Jalan Kabupaten Lain-lain	1.329.137.400,00	-
* Koreksi Reklasifikasi perencanaan pembangunan Sarana air bersih Desa Liang Nyaling dari Air sumber/Mata Air ke KDP Air Sumber/Mata Air (Ekstrakompatable)	-	47.030.000,00
* Koreksi Pengurangan Nilai pada jalan, Irigasi dan Jaringan yang dikarenakan masuk ke Barang Ekstrakompatable	-	119.710.000,00

**7. Aset Lainnya**

- Saldo Awal 01 Januari 2019	515.961.250,00
- Penambahan	139.000.000,00
- Pengurangan	-
<b>Saldo Akhir 31 Desember 2019</b>	<b>654.961.250,00</b>

No	LAN, IRIGASI DAN JARING	SALDO AWAL 1 JANUARI 2019	MUTASI 2019		Saldo 31/12/2019
			Penambahan	Pengurangan	
1	Aset Lainnya	0,00	-	-	69.500.000,00
2	Aset Kondisi Rusak Berat	117.000.000,00	-	-	117.000.000,00
3	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	0,00	-	-	0,00
4	Aset Tidak Berwujud	398.961.250,00	69.500.000,00	-	468.461.250,00
	<b>Jumlah</b>	<b>515.961.250,00</b>	<b>69.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>654.961.250,00</b>

<b>2. 3. ASET LAINNYA</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
- Aset Tetap Lainnya merupakan aset yang masih dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2018 berupa Aset Lain-lain.	<b>137.000.000,00</b>	<b>137.000.000,00</b>
<b>1. Aset Tidak Berwujud</b>		
- Saldo Awal 01 Januari 2019	-	-
- Penambahan	-	-
- Pengurangan	-	-
Saldo Akhir 31 Desember 2019	-	-
<b>2. Aset Lain-lain</b>		
- Saldo Awal 01 Januari 2019	137.000.000,00	
- Penambahan	-	
- Pengurangan	-	
Saldo Akhir 31 Desember 2019	<b>137.000.000,00</b>	
<b>3. KEWAJIBAN</b>		
<b>3. 1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
<b>3. 1. 1 UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
	-	699.965.080,00
<b>3. 1. 2 KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
R/K PPKD	-	-
Jumlah Kewajiban	-	<b>699.965.080,00</b>
<b>4. EKUITAS</b>		
<b>EKUITAS</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
* Aset	<b>1.350.242.292.953,23</b>	<b>1.356.758.858.772,23</b>
* Kewajiban	-	<b>699.965.080,00</b>
Jumlah Ekuitas Akhir yang dimiliki oleh DPUPR per 31 Desember 2019	<b>1.350.242.292.953,23</b>	<b>1.356.058.893.692,23</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>1.350.242.292.953,23</b>	<b>1.356.758.858.772,23</b>
		1.351.826.968.182,23

**3. LAPORAN OPERASIONAL ( LO )**

Realisasi belanja di Tahun Anggaran 2019 terdapat realisasi belanja yang tidak menjadi beban ditahun anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

**2. 1. BEBAN OPERASI**

Jumlah Beban Operasi untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

No	Beban Operasi	2019	2018
<b>1</b>	<b>Beban Pegawai - LO</b>		
	Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	2.320.477.200,00	2.299.802.000,00
	Beban Tunjangan Keluarga - LO	225.591.414,00	226.421.536,00
	Beban Tunjangan Jabatan - LO	233.990.000,00	242.030.000,00
	Beban Tunjangan Beras - LO	137.525.580,00	147.736.800,00
	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	2.087.524,00	1.898.478,00
	Beban Pembulatan Gaji - LO	36.458,00	40.006,00
	Tunjangan Umum - LO	79.715.000,00	86.235.000,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.783.446,00	4.718.843,00
	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	14.350.272,00	5.930.656,00
	Tunjangan Lauk Pauk	367.722.000,00	405.567.000,00
	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah	1.832.340.000,00	2.384.500.000,00
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	503.750.000,00	421.920.000,00
	Honorarium PNS Lainnya	708.100.000,00	790.180.000,00
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	4.584.759.000,00	4.630.814.000,00
	Uang Lembur PNS	22.484.000,00	74.970.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>11.037.711.894,00</b>	<b>11.722.764.319,00</b>
<b>2</b>	<b>Beban Barang dan Jasa</b>		
	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	117.730.000,00	132.953.600,00
	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Ke	4.980.000,00	29.950.000,00
	Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	9.900.000,00	19.800.000,00
	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	71.097.550,00	156.294.575,00
	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	738.249.750,00	561.300.000,00
	Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan	58.235.900,00	153.754.600,00
	Belanja Bahan Pupuk dan Kimia	0,00	14.350.000,00
	Beban Jasa telepon	0,00	144.946.857,00
	Beban Jasa Air	4.600.000,00	0,00
	Beban Jasa listrik	125.230.850,00	155.582.134,00
	Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	0,00	68.780.000,00
	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit	194.564.223,00	16.490.480,00
	Beban Jasa Sertifikasi	0,00	0,00
	Beban Jasa Transaksi Keuangan	0,00	0,00
	Beban Publikasi	0,00	2.900.000,00
	Beban Jasa Pendukung Kegiatan	0,00	104.500.000,00
	Beban Jasa Service	79.794.000,00	116.010.000,00
	Beban Pengganti Suku Cadang	427.171.473,00	616.542.986,00
	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	140.370.000,00	200.000.000,00
	Beban Jasa KIR	1.010.000,00	955.000,00
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	11.290.282,00	14.173.079,00
	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.404.555,00	0,00
	Beban Cetak	14.922.500,00	23.748.000,00
	Beban Penggandaan	42.333.750,00	53.649.900,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	0,00	17.655.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Tamu	14.920.000,00	27.948.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	14.460.000,00
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	48.735.000,00	104.673.000,00
	Beban Pakaian Batik Tradisional	0,00	49.900.000,00
	Beban Pakaian Olahraga	0,00	49.200.000,00
	Beban Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam	42.250.000,00	74.800.000,00
	Beban Kerja Lapangan	0,00	1.030.000,00
	Dst...		
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	895.832.000,00	629.478.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.049.862.327,00	1.625.090.650,00
	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	89.384.000,00	123.205.000,00
	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
		49.320.000,00	0,00
	Beban Irigasi Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.371.907.629,00	3.345.380.000,00
	Beban Jasa Keahlian Profesi	0,00	0,00
	Beban Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	0,00	0,00
	Beban Jasa Konsultasi Perencanaan	3.000.000,00	494.029.000,00
	Beban Bimbingan Teknis	18.000.000,00	36.500.000,00
	Belanja Pemeliharaan Jalan	0,00	0,00
	Belanja Pemeliharaan Jembatan	0,00	0,00
	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	0,00	0,00
	Honorarium PNS Lainnya	0,00	18.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.626.095.789,00</b>	<b>9.198.029.861,00</b>

<b>3</b>	<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	Beban Penyusutan Alat-alat Besar Darat	0,00	1.139.458.757,00
	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	347.741.030,00
	Beban Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara	0,00	1.443.750,00
	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	0,00	49.250.000,00
	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	23.726.000,00
	Beban Penyusutan Alat Ukur	0,00	47.597.945,00
	Beban Penyusutan Alat Pengolahan	0,00	2.900.000,00
	Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0,00	4.338.542,00
	Beban Penyusutan Alat Kantor	0,00	40.804.000,00
	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	0,00	214.594.756,00
	Beban Penyusutan Komputer	0,00	143.120.963,00
	Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	41.660.567,00
	Beban Penyusutan Alat Studio	0,00	21.595.800,00
	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	0,00	19.000.000,00
	Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	0,00	20.141.667,00
	Beban Penyusutan Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	1.521.052,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	5.166.618.163,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	905.347.923,00
	Beban Penyusutan Bangunan Bersejarah	0,00	4.939.980,00
	Beban Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan	0,00	128.934.762,00
	Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu	0,00	4.438.000,00
	Beban Penyusutan Jalan	0,00	100.880.267.869,00
	Beban Penyusutan Jembatan	0,00	5.756.955.629,00
	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	0,00	649.123.162,00
	Beban Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut	0,00	1.870.000,00
	Beban Penyusutan Bangunan pengaman sungai dan penanggulangan bencana	0,00	1.605.437.560,00
	Alam	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0,00	67.015.128,00
	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	0,00	206.792.305,00
	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	0,00	37.203.542,00
	Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	808.868.864,00
	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor	0,00	11.646.934,00
	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	120.365.667,00
	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	0,00	5.835.284,00
	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	0,00	4.331.962.738,00
	Beban Penyusutan Jaringan Listrik	0,00	107.290.786,00
	Beban Amortasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>122.919.809.125,00</b>

<b>4</b>	<b>Beban Hibah</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	2.833.773.603,00	404.420.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.833.773.603,00</b>	<b>404.420.000,00</b>

<b>5</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	772.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>772.500,00</b>

<b>6</b>	<b>Beban Lain-lain</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	Beban Lain-lain	0,00	789.234.350,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>789.234.350,00</b>
	<b>Total Beban</b>	<b>20.497.581.286,00</b>	<b>145.035.030.155,00</b>

*Beban Lain-lain merupakan Barang Ekstrakompabel dari Peralatan dan Mesin - Peralatan Jaringan ke Beban Lain-lain*

<b>2. 3.</b>	<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	Defisit Penghapusan Aset Tetap	-	<b>0,00</b>

<b>2. 4.</b>	<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	Surplus/Defisit LO Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	<b>Pendapatan LO</b>	<b>172.100.000,00</b>	<b>454.000.000,00</b>
	<b>Beban LO</b>	<b>20.497.581.286,00</b>	<b>144.245.523.305,00</b>
	<b>Kegiatan Non Operasional</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Surplus/Defisit LO</b>	<b>(20.325.481.286,00)</b>	<b>(143.791.523.305,00)</b>

**4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**Ekuitas Akhir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 sebesar **Rp. 1.350.245.292.953,23**

Uraian	LPE	
	2018	2017
<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>1.352.087.440.949,00</b>	<b>1.356.058.893.692,23</b>
<b>Surplus/Defisit LO</b>	<b>(20.325.481.286,00)</b>	<b>(143.791.523.305,00)</b>
<b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar</b>		
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
Koreksi Ekuitas Lainnya	-	<b>772.500,00</b>
<b>Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan</b>	<b>71.617.849.726,00</b>	<b>137.977.150.066,00</b>
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>1.403.379.809.389,00</b>	<b>1.350.245.292.953,23</b>

==